

PERAN STRATEGIS KEPALA DAERAH DALAM MENDORONG PARADIPLOMASI UNTUK DIPLOMASI EKONOMI DAERAH

Istiq Agustina¹, Andini Ika Febriyanti², Desta Nindia Putri³, Luki Oka Prastio⁴
istiqagustina@gmail.com¹, andiniikafebriyanti2@gmail.com², pdestanindia@gmail.com³,
luki@untirta.ac.id⁴

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Paradiplomasi merupakan wujud keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional untuk memperkuat pembangunan ekonomi lokal di era globalisasi dan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, paradiplomasi berperan strategis sebagai instrumen diplomasi ekonomi melalui promosi investasi, penguatan ekspor, dan kolaborasi lintas negara yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah. Keberhasilan praktik ini sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala daerah sebagai aktor utama yang menginisiasi kerja sama, membangun jejaring global, serta mengarahkan birokrasi agar adaptif terhadap dinamika internasional. Kepemimpinan strategis yang visioner mampu mengubah paradiplomasi dari aktivitas simbolik menjadi kebijakan publik yang terukur dan berkelanjutan. Dalam kerangka multi-level governance, paradiplomasi berfungsi komplementer terhadap diplomasi nasional, menjembatani kepentingan lokal dengan peluang global melalui tata kelola yang kolaboratif. Sinergi antara kepemimpinan kepala daerah, kapasitas kelembagaan, dan kerangka hukum otonomi daerah menjadi kunci bagi terwujudnya paradiplomasi yang efektif sebagai instrumen pembangunan ekonomi subnasional yang berdaya saing dan berorientasi keberlanjutan.

Kata Kunci : Paradiplomasi, Diplomasi Ekonomi, Kepemimpinan Kepala Daerah, Otonomi Daerah, Tata Kelola Pemerintahan.

ABSTRACT

Paradiplomacy represents the involvement of local governments in international relations to strengthen local economic development in the era of globalization and decentralization. In the context of regional autonomy, paradiplomacy plays a strategic role as an instrument of economic diplomacy through investment promotion, export enhancement, and cross-border collaborations oriented toward improving regional competitiveness. The success of this practice is largely determined by the quality of leadership from regional heads as the primary actors who initiate cooperation, build global networks, and direct bureaucracy to be adaptive to international dynamics. Visionary strategic leadership is capable of transforming paradiplomacy from symbolic activities into measurable and sustainable public policies. Within the framework of multi-level governance, paradiplomacy functions complementarily to national diplomacy, bridging local interests with global opportunities through collaborative governance. Synergy among the leadership of regional heads, institutional capacity, and the legal framework of regional autonomy becomes the key to realizing effective paradiplomacy as an instrument for competitive and sustainability-oriented subnational economic development.

Keywords : *Paradiplomacy, Economic Diplomacy, Regional Head Leadership, Regional Autonomy, Governance.*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan desentralisasi, peran pemerintah daerah tidak lagi terbatas pada pengelolaan urusan domestik semata, melainkan telah berkembang menjadi aktor penting dalam menjalin hubungan lintas batas negara. Fenomena ini dikenal sebagai paradiplomasi, yaitu keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional untuk mencapai tujuan politik, sosial, dan ekonomi di tingkat subnasional (Duchacek, 1984). Perubahan konstelasi global yang ditandai oleh meningkatnya interdependensi ekonomi,

arus investasi lintas negara, serta keterbukaan informasi mendorong daerah untuk mengambil peran lebih aktif dalam memanfaatkan peluang global guna memperkuat pembangunan ekonomi lokal. Dalam konteks inilah, kepemimpinan kepala daerah menjadi faktor strategis yang menentukan arah, efektivitas, dan keberlanjutan praktik paradiplomasi di Indonesia.

Pergeseran paradigma pemerintahan dari sistem yang sentralistik menuju desentralistik melalui penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan berinteraksi dengan aktor internasional. Paradiplomasi bukan lagi aktivitas simbolik, melainkan strategi pembangunan yang memungkinkan daerah mengakses sumber daya global seperti investasi, teknologi, dan jaringan kerja sama lintas negara. Dalam praktiknya, banyak daerah di Indonesia mulai menjalin kemitraan internasional melalui program sister city, sister province, misi dagang, hingga forum promosi investasi yang difasilitasi oleh kepala daerah. Aktivitas-aktivitas tersebut menandakan adanya transformasi peran kepala daerah sebagai aktor diplomasi ekonomi yang berupaya mengintegrasikan kepentingan lokal ke dalam sistem ekonomi global.

Kepemimpinan publik modern menuntut kepala daerah memiliki visi global, kemampuan adaptif terhadap dinamika internasional, serta kapasitas untuk membangun kolaborasi lintas aktor. (Bryson & Crosby, 2014) menekankan bahwa kepemimpinan publik yang efektif bukan sekadar kemampuan administratif, melainkan kemampuan untuk menciptakan public value melalui kolaborasi multi-aktor dan multi-level governance. Dalam konteks paradiplomasi, kepala daerah berperan sebagai policy entrepreneur yang mengidentifikasi peluang kerja sama internasional, mengarahkan birokrasi daerah agar mampu merespons tuntutan global, serta memastikan agar kebijakan kerja sama tersebut memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadikan kepemimpinan kepala daerah bukan sekadar pelaksana kebijakan, melainkan penggerak utama dalam diplomasi ekonomi daerah.

Dari sisi konseptual, paradiplomasi berakar pada teori interdependensi global yang dikembangkan oleh (Duchacek, 1984) dan (Soldatos, 1993). Mereka memandang bahwa meningkatnya aktivitas internasional oleh pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari proses globalisasi dan desentralisasi kewenangan. Pemerintah daerah kini menjadi bagian dari jaringan diplomasi global melalui aktivitas transborder cooperation, municipal diplomacy, dan kerja sama ekonomi lintas wilayah. Paradiplomasi pada dasarnya bersifat komplementer terhadap diplomasi nasional, bukan kompetitif, karena bertujuan mendukung kepentingan nasional melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah.

Di sisi lain, diplomasi ekonomi sebagai instrumen utama paradiplomasi menjadi semakin penting di era persaingan antarwilayah yang ketat. (Saner & Yiu, 2003) menyebutkan bahwa diplomasi ekonomi pasca-modern telah berevolusi dari aktivitas yang semata dilakukan oleh negara menjadi praktik multi-aktor, di mana pemerintah daerah turut memainkan peran strategis dalam promosi investasi, perdagangan, dan kerja sama ekonomi. (Okano-Heijmans, 2013) menambahkan bahwa diplomasi ekonomi menuntut keseimbangan antara kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan sebuah pendekatan yang dikenal dengan istilah national interest balancing. Dalam konteks daerah, pendekatan ini diterjemahkan melalui kebijakan yang menghubungkan potensi lokal dengan peluang global, seperti promosi pariwisata, investasi berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Paradiplomasi daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum otonomi daerah yang memberikan legitimasi formal bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama

luar negeri. Rondinelli (1981) menjelaskan bahwa desentralisasi menciptakan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, memungkinkan inovasi kebijakan, dan memperkuat kapasitas lokal. Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi diplomasi ekonomi dengan karakteristik sosial, geografis, dan ekonomi masing-masing wilayah. Misalnya, daerah dengan basis industri akan lebih menonjolkan kerja sama investasi dan perdagangan, sementara daerah dengan potensi pariwisata lebih fokus pada promosi budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi fondasi legal sekaligus politik bagi berkembangnya praktik paradiplomasi di Indonesia.

Namun demikian, tidak semua daerah mampu memanfaatkan peluang paradiplomasi secara optimal. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Rachmawati et al. (2019), menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama internasional daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta kepemimpinan kepala daerah. Daerah yang memiliki birokrasi adaptif, regulasi pendukung, dan jejaring internasional yang mapan cenderung lebih sukses dalam menarik investasi dan memperluas pasar produk lokal. Sebaliknya, daerah yang belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai sering kali menjadikan paradiplomasi sebatas kegiatan seremonial tanpa hasil ekonomi yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan paradiplomasi tidak hanya ditentukan oleh faktor struktural, tetapi juga oleh kapabilitas dan visi kepemimpinan kepala daerah.

Paradiplomasi juga membawa implikasi terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, kepala daerah harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan lokal, nasional, dan internasional. Soldatos (1990) mengingatkan bahwa paradiplomasi yang efektif harus tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional agar tidak menimbulkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, koordinasi vertikal antara dua level pemerintahan menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional daerah berjalan sinergis dengan kebijakan luar negeri nasional. Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini difasilitasi melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri yang berperan sebagai pengawas sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam aktivitas paradiplomasi.

Kepala daerah yang berorientasi global pada umumnya menunjukkan gaya kepemimpinan strategic leadership yaitu kemampuan untuk mengantisipasi perubahan eksternal, merumuskan visi jangka panjang, dan memobilisasi sumber daya secara efektif (Fernandez & Rainey, 2017). Dalam praktik paradiplomasi, gaya kepemimpinan ini diwujudkan melalui inisiatif konkret seperti misi dagang internasional, pembentukan unit kerja sama luar negeri di tingkat daerah, serta pelibatan aktor non-pemerintah seperti akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Keterlibatan multi-aktor tersebut menggambarkan pergeseran paradigma dari government menuju governance, di mana pengambilan keputusan publik tidak lagi bersifat top-down, melainkan hasil dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan (Kooiman, 2003).

Selain kepemimpinan, faktor branding daerah juga menjadi elemen penting dalam diplomasi ekonomi modern. Pemerintah daerah membangun citra dan identitas ekonomi melalui narasi pembangunan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Branding semacam ini berfungsi untuk menarik investor, wisatawan, serta memperkuat kepercayaan mitra internasional terhadap kapasitas tata kelola daerah. Dalam konteks ini, paradiplomasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen soft power daerah yang dapat meningkatkan reputasi dan posisi tarif di tingkat global. Dengan dukungan kepemimpinan yang visioner, branding daerah dapat dikembangkan menjadi strategi diplomasi ekonomi yang terukur dan berorientasi jangka panjang (Okano-

Heijmans, 2013).

Namun, terdapat pula berbagai tantangan dalam implementasi paradiplomasi. Keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, serta birokrasi yang kaku sering menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi kerja sama internasional daerah. Selain itu, paradiplomasi yang terlalu bergantung pada figur kepala daerah berisiko kehilangan keberlanjutan ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Untuk itu, pelembagaan paradiplomasi menjadi keharusan agar aktivitas tersebut dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Paradiplomasi perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD, serta diatur melalui regulasi turunan seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian, paradiplomasi dapat berfungsi sebagai kebijakan publik yang memiliki arah strategis dan nilai tambah ekonomi yang jelas bagi daerah.

Selain manfaat ekonomi, paradiplomasi juga memberikan dampak sosial dan politik yang signifikan. Melalui kerja sama lintas negara, pemerintah daerah dapat memperluas wawasan birokrasi, meningkatkan kapasitas inovasi, dan memperkuat diplomasi budaya yang mendukung kohesi sosial masyarakat lokal. Aktivitas ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hubungan internasional yang semakin terdesentralisasi, di mana aktor subnasional berperan sebagai mitra penting dalam mendukung diplomasi nasional. Paradiplomasi, dalam hal ini, menjadi refleksi dari sistem multi-level governance, di mana pembagian peran antara pusat dan daerah tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan bersifat komplementer dan sinergis (Keohane & Nye, 1998).

Fenomena ini semakin relevan ketika dihadapkan pada dinamika ekonomi global yang menuntut setiap daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Kepala daerah dengan kepemimpinan yang inovatif mampu menjadikan paradiplomasi sebagai sarana memperkuat posisi ekonomi daerah di pasar internasional melalui peningkatan ekspor, pengembangan UMKM, serta kolaborasi teknologi dengan mitra asing. Keberhasilan beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa Barat dan Bali, menunjukkan bahwa paradiplomasi dapat berfungsi sebagai katalis bagi transformasi ekonomi daerah jika dijalankan dengan kepemimpinan yang kuat dan tata kelola yang baik. Paradiplomasi semacam ini bukan hanya memperluas jaringan kerja sama, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang konkret bagi masyarakat daerah.

Secara teoretis, hubungan antara kepemimpinan kepala daerah, paradiplomasi, dan diplomasi ekonomi dapat dipahami sebagai mekanisme kebijakan yang saling terhubung. Kepemimpinan berfungsi sebagai penggerak (driving force), paradiplomasi sebagai instrumen operasional, dan diplomasi ekonomi sebagai hasil akhir dari interaksi keduanya. Ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan, karena keberhasilan diplomasi ekonomi daerah bergantung pada kemampuan kepala daerah memanfaatkan ruang otonomi yang tersedia untuk membangun jejaring internasional yang produktif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana kepemimpinan kepala daerah berperan secara strategis dalam mendorong paradiplomasi sebagai instrumen diplomasi ekonomi daerah yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kerangka hukum otonomi daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam menjawab tantangan desentralisasi dan globalisasi yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Paradiplomasi tidak hanya penting sebagai wujud kemandirian daerah dalam hubungan internasional, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, studi tentang peran strategis kepala daerah dalam mendorong paradiplomasi untuk diplomasi ekonomi daerah menjadi relevan secara akademis dan praktis, terutama dalam memperkuat

kapasitas daerah menghadapi persaingan global dan memperkokoh posisi Indonesia dalam tatanan hubungan internasional yang berbasis kolaborasi multi-level dan multi-aktor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran strategis kepala daerah dalam mendorong paradiplomasi sebagai instrumen diplomasi ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu paradiplomasi dan diplomasi ekonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan data empiris, tetapi juga memerlukan analisis terhadap konteks, relasi aktor, kerangka kebijakan, dan dinamika institusional yang berkembang di tingkat pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah fenomena secara komprehensif melalui interpretasi literatur dan dokumen kebijakan yang relevan.

Data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (library research). Literatur yang digunakan meliputi artikel ilmiah yang membahas konsep paradiplomasi, diplomasi ekonomi, kepemimpinan pemerintahan daerah, serta teori desentralisasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kerja sama luar negeri, serta laporan resmi pemerintah daerah yang telah melaksanakan praktik paradiplomasi. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan teori dan praktik secara lebih luas, sekaligus mengidentifikasi pola dan kecenderungan dalam pelaksanaan diplomasi subnasional di Indonesia.

Proses analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) yang digunakan untuk menelaah struktur konsep, temuan empiris, serta hubungan antara variabel penelitian. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan literatur yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan proses penyaringan dan interpretasi terhadap isi sumber-sumber tersebut. Selanjutnya, data dikategorisasikan ke dalam tema-tema utama, yaitu konsep paradiplomasi, praktik diplomasi ekonomi daerah, model kepemimpinan kepala daerah, serta kerangka desentralisasi yang memberikan ruang bagi aktivitas internasional pemerintahan subnasional. Setelah proses kategorisasi, penelitian melakukan sintesis untuk membangun pemahaman holistik mengenai bagaimana kepemimpinan kepala daerah, kewenangan otonomi daerah, serta peluang global saling berinteraksi dalam membentuk strategi paradiplomasi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kerangka analisis penelitian ini mengikuti alur yang menempatkan kepemimpinan kepala daerah sebagai titik awal, diikuti oleh kebijakan dan strategi paradiplomasi yang kemudian menghasilkan dampak pada kinerja diplomasi ekonomi daerah. Alur ini digambarkan dalam diagram analisis pada template jurnal, yang menunjukkan bahwa penelitian berangkat dari landasan teori sebagai fondasi, kemudian diarahkan pada proses perencanaan, penelusuran informasi, analisis data, hingga tahap sintesis temuan. Model analisis ini membantu peneliti memetakan hubungan sebab-akibat antara variabel, serta menjelaskan bagaimana paradiplomasi dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Daerah sebagai Aktor Paradiplomasi

Kepemimpinan kepala daerah menempati posisi sentral dalam keberhasilan paradiplomasi sebagai instrumen diplomasi ekonomi daerah. Dalam lanskap hubungan internasional kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, kompetisi antarwilayah, dan

meningkatnya jejaring lintas-batas, kepala daerah tidak lagi berfungsi semata sebagai administrator kebijakan domestik, melainkan bertransformasi menjadi aktor politik-ekonomi subnasional yang berkapasitas membangun relasi internasional. Perubahan peran ini sejalan dengan pendekatan public leadership Bryson dan Crosby (2006; 2014) yang menekankan tuntutan bagi pemimpin sektor publik untuk mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas aktor dan lintas sektor demi menghasilkan public value. Dalam kerangka paradiplomasi, kepala daerah berperan sebagai agenda setter yang menentukan arah, prioritas, serta logika kebijakan hubungan internasional daerah apakah paradiplomasi dibingkai sebagai kegiatan seremonial atau sebagai instrumen strategis yang terkait langsung dengan target pembangunan ekonomi.

Orientasi global kepala daerah menjadi variabel kunci yang membedakan paradiplomasi yang “simbolik” dari yang “substantif”. Kepala daerah yang memiliki visi global cenderung memandang kerja sama internasional sebagai perangkat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses investasi, dan memperkuat daya saing daerah, bukan sekadar aktivitas protokoler. Argumen ini menguatkan posisi kepemimpinan sebagai faktor determinan, bukan hanya faktor pendukung. Dari perspektif strategic leadership, Fernandez dan Rainey (2017) menegaskan bahwa pemimpin publik yang efektif harus sanggup merespons perubahan lingkungan eksternal, termasuk tekanan globalisasi dan persaingan antarwilayah. Dalam konteks paradiplomasi, tuntutan tersebut mengharuskan kepala daerah membaca dinamika ekonomi global, memetakan peluang investasi dan perdagangan, serta mengintegrasikan peluang itu ke dalam kebijakan pembangunan daerah secara terarah. Hal ini tercermin dalam keputusan strategis seperti pemilihan mitra internasional, penentuan sektor unggulan yang dipromosikan, dan desain bentuk kerja sama investasi, perdagangan, transfer teknologi, hingga pengembangan kapasitas sosial yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Peran kepala daerah sebagai policy entrepreneur juga semakin menonjol dalam praktik paradiplomasi. Merujuk Kingdon (1995), policy entrepreneur adalah aktor yang mampu menghubungkan masalah, solusi, dan peluang politik dalam satu momentum kebijakan. Dalam paradiplomasi, kepala daerah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan daerah sebagai problem stream, memosisikan kerja sama internasional sebagai policy stream, serta memanfaatkan legitimasi politik dan otoritasnya untuk membuka ruang implementasi sebagai political stream. Peran ini tampak dalam inisiasi forum investasi daerah, pelaksanaan misi dagang ke luar negeri, dan penjajakan kerja sama dengan organisasi internasional maupun pemerintah subnasional asing. Dengan kata lain, paradiplomasi yang efektif tidak terjadi secara otomatis karena adanya peluang global, tetapi karena adanya aktor yang secara aktif “mengonversi” peluang tersebut menjadi program kebijakan yang dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan.

Kepemimpinan kepala daerah juga menentukan kemampuan birokrasi daerah untuk beradaptasi dengan tuntutan hubungan internasional yang semakin teknokratis. Teori transformational leadership dalam sektor publik menekankan kemampuan pemimpin mengubah pola kerja organisasi agar lebih inovatif, responsif, dan berorientasi hasil (Bass & Riggio, 2006). Dalam konteks paradiplomasi, kepala daerah perlu mendorong pembentukan unit kerja sama luar negeri, memperkuat kapasitas SDM aparatur, serta meningkatkan koordinasi lintas dinas agar kerja sama internasional tidak berhenti pada penandatanganan, melainkan berlanjut pada implementasi, pemantauan, dan evaluasi capaian. Tanpa kepemimpinan yang kuat, paradiplomasi mudah terhambat oleh rigiditas birokrasi, rendahnya kapasitas institusional, dan lemahnya mekanisme tindak lanjut.

Selain dimensi internal daerah, kepemimpinan juga penting dalam membangun legitimasi paradiplomasi di tingkat nasional. Soldatos (1990) menegaskan bahwa

paradiplomasi yang berhasil bersifat komplementer, bukan kompetitif, terhadap diplomasi nasional. Karena itu, kepala daerah berfungsi sebagai mediator antara kepentingan lokal dan kerangka kebijakan pusat, memastikan inisiatif internasional daerah tetap selaras dengan kepentingan nasional serta mematuhi kerangka regulasi hubungan luar negeri. Fungsi mediasi ini menuntut keterampilan diplomatik, komunikasi politik, dan pemahaman normatif terhadap batas kewenangan, sehingga paradiplomasi bukan hanya aktif, tetapi juga “legitimate” dalam tata kelola negara. Pada akhirnya, kualitas paradiplomasi termasuk dampak ekonominya sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan: kepala daerah yang visioner dan strategis cenderung menghasilkan paradiplomasi yang terencana dan berdaya guna, sedangkan kepemimpinan yang lemah membuat paradiplomasi sporadis, tidak terintegrasi, dan minim kontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Strategi Diplomasi Ekonomi Daerah

Strategi diplomasi ekonomi daerah merupakan bentuk operasionalisasi paradiplomasi yang diarahkan secara langsung untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi lokal. Perkembangan hubungan internasional kontemporer menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi tidak lagi dimonopoli negara pusat; aktor subnasional seperti pemerintah daerah juga memainkan peran penting karena memiliki kepentingan ekonomi spesifik dan kebutuhan pembangunan yang bersifat lokal. Saner dan Yiu (2003) menegaskan bahwa transformasi diplomasi ekonomi pada era globalisasi ditandai oleh perluasan aktor, instrumen, dan arena diplomasi, sehingga pemerintah daerah dapat menjadi aktor promosi perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lintas negara. Implikasinya, diplomasi ekonomi daerah perlu dijalankan secara strategis: terstruktur, adaptif, dan berorientasi hasil, agar paradiplomasi tidak berhenti pada simbol, melainkan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang terukur.

Dalam kerangka ini, Okano-Heijmans (2013) memahami diplomasi ekonomi sebagai proses interest balancing, yakni kemampuan aktor pemerintah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pertimbangan politik, regulasi, dan stabilitas institusional. Pada tingkat daerah, prinsip tersebut berarti strategi diplomasi ekonomi harus tetap selaras dengan kebijakan nasional sekaligus disesuaikan dengan kapasitas dan keunggulan komparatif wilayah. Salah satu strategi utama adalah promosi investasi internasional melalui forum investasi, misi dagang, dan pertemuan bisnis lintas negara untuk memperkenalkan peluang investasi di sektor unggulan seperti manufaktur, pariwisata, pertanian modern, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif. Strategi ini tidak hanya bertujuan menarik foreign direct investment, tetapi juga membangun citra daerah sebagai destinasi investasi yang kompetitif dan berkelanjutan. Van Bergeijk, Okano-Heijmans, dan Melissen (2011) menekankan bahwa diplomasi ekonomi modern bertumpu pada penciptaan investment-friendly environment melalui kombinasi promosi, kepastian regulasi, dan stabilitas politik lokal; karena itu, kredibilitas kepala daerah dan konsistensi tata kelola menjadi penentu kepercayaan investor sekaligus penguatan posisi tawar daerah dalam negosiasi.

Selain investasi, strategi diplomasi ekonomi daerah juga diarahkan pada penguatan ekspor dan akses pasar global, terutama bagi produk UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pameran internasional, trade expo, dan business matching, sehingga jejaring perdagangan global yang sebelumnya sulit diakses dapat dijembatani secara kelembagaan. Literatur diplomasi komersial menegaskan bahwa keterlibatan aktor subnasional dalam promosi ekspor dapat meningkatkan daya saing produk lokal, bukan hanya melalui peningkatan volume ekspor, tetapi juga melalui dorongan standar kualitas, sertifikasi, inovasi, dan adaptasi produk

sesuai kebutuhan pasar global (Saner & Yiu, 2003). Dengan demikian, diplomasi ekonomi daerah semestinya dipahami sebagai proses penguatan ekosistem ekonomi lokal agar mampu masuk dan bertahan dalam pasar internasional.

Kerja sama sister city dan sister province juga menjadi instrumen penting yang bersifat jangka menengah-panjang. Melalui skema ini, kerja sama dapat diarahkan pada pertukaran pengetahuan, pengembangan sektor ekonomi strategis, kolaborasi teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada desain program, indikator capaian, dan komitmen politik kepala daerah, karena tanpa itu kerja sama mudah terjebak pada seremoni. Duchacek (1988) menegaskan bahwa efektivitas paradiplomasi ditentukan oleh kemampuan aktor subnasional mengaitkan kerja sama internasional dengan kebutuhan pembangunan konkret; maka, kerja sama sister city/province yang ekonomis menuntut perencanaan yang jelas, mekanisme tindak lanjut, dan evaluasi periodik.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi dalam forum dan jaringan ekonomi global untuk memperluas jejaring, meningkatkan reputasi, dan membuka akses terhadap program bantuan teknis maupun pembiayaan pembangunan. Keikutsertaan dalam jaringan kota dunia atau konferensi tematik dapat mempertemukan pemerintah daerah dengan investor, organisasi internasional, dan mitra subnasional lain, sehingga membuka ruang kolaborasi proyek inovatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam kompetisi global antarwilayah, reputasi juga menjadi modal; karena itu, branding daerah semakin relevan sebagai instrumen diplomasi ekonomi. Branding membangun identitas daerah melalui narasi keunggulan kompetitif, stabilitas sosial, budaya lokal, dan iklim investasi; selaras dengan Okano-Heijmans (2013) yang menekankan bahwa diplomasi ekonomi modern tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga reputasional dalam jangka panjang. Pada akhirnya, strategi diplomasi ekonomi daerah akan efektif bila paradiplomasi dijalankan secara konsisten, terukur, dan ditopang oleh tata kelola serta kepemimpinan yang kredibel.

Otonomi Daerah sebagai Fondasi Legal dan Institusional Paradiplomasi

Keberhasilan paradiplomasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka otonomi daerah yang menyediakan legitimasi hukum, ruang kebijakan, serta kapasitas institusional bagi pemerintah daerah untuk berinteraksi dengan aktor internasional. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah menjadi prasyarat yang memungkinkan pemerintah daerah bertransformasi dari pelaksana kebijakan pusat menjadi aktor pembangunan yang memiliki inisiatif strategis, termasuk dalam kerja sama luar negeri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan ruang kewenangan daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri sepanjang berada dalam koridor kebijakan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerangka ini biasanya dioperasionalkan melalui aturan turunan, termasuk regulasi teknis seperti peraturan kementerian terkait kerja sama luar negeri pemerintah daerah, yang sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi vertikal pusat daerah agar aktivitas paradiplomasi tetap sejalan dengan agenda diplomasi nasional.

Secara teoretis, desentralisasi sebagaimana dikemukakan Rondinelli (1981) memperluas ruang inovasi kebijakan dengan mendekatkan pengambilan keputusan pada kebutuhan dan potensi lokal. Otonomi daerah karenanya tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis: meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kreativitas kebijakan publik. Paradiplomasi dapat dipandang sebagai manifestasi konkret desentralisasi ketika pemerintah daerah memanfaatkan kewenangannya untuk mengakses peluang global demi memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial lokal. Smith (2023) menambahkan bahwa desentralisasi modern mendorong local policy entrepreneurship kemampuan aktor lokal

mengidentifikasi peluang, merancang kebijakan inovatif, dan membangun jejaring lintas batas yang pada praktiknya membuat daerah mampu merespons dinamika global secara lebih cepat dan kontekstual dibanding pendekatan sentralistik.

Akan tetapi, otonomi daerah sebagai fondasi paradiplomasi menuntut kesiapan institusional yang memadai. Daerah dengan kapasitas birokrasi kuat, regulasi turunan yang jelas (misalnya Perda/Perkada), serta unit kerja sama luar negeri yang fungsional cenderung lebih mampu mengimplementasikan paradiplomasi secara konsisten dan berkelanjutan. Kapasitas tersebut mencakup kompetensi SDM dalam hubungan internasional, negosiasi lintas budaya, manajemen proyek, dan pemahaman regulasi nasional maupun internasional. Tanpa dukungan institusional, paradiplomasi berisiko menjadi personalistik dan rapuh, terutama saat pergantian kepemimpinan. Temuan Rachmawati et al. (2019) menguatkan argumen bahwa kerja sama internasional pemerintah daerah dapat berkontribusi pada penguatan pariwisata, ekonomi kreatif, dan pembangunan sosial ketika ditopang tata kelola kelembagaan yang baik; artinya, otonomi daerah bukan hanya “memberi ruang”, tetapi juga menuntut akuntabilitas dan profesionalisme agar manfaat paradiplomasi dirasakan masyarakat luas.

Dalam kerangka multi-level governance, otonomi daerah juga membuka pembagian peran yang adaptif antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat tetap menjadi koordinator utama diplomasi dan menjaga kepentingan nasional, sementara pemerintah daerah menjalankan paradiplomasi yang lebih fokus pada kepentingan lokal dan sektoral. Sinergi ini menunjukkan paradiplomasi tidak harus dipahami sebagai ancaman terhadap negara, melainkan dapat memperkuat kapasitas negara melalui distribusi peran yang lebih responsif terhadap kompleksitas global. Dengan demikian, otonomi daerah patut dipahami sebagai fondasi legal dan institusional yang memungkinkan daerah berperan aktif, inovatif, dan strategis dalam hubungan internasional yang terdesentralisasi, sekaligus berpotensi mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Paradiplomasi Daerah

Implementasi paradiplomasi daerah tidak berlangsung dalam ruang hampa kebijakan, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi faktor struktural, institusional, politik, dan teknokratis yang saling berinteraksi. Paradiplomasi memerlukan prasyarat tertentu agar mampu menghasilkan dampak pembangunan yang nyata dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan atau kegagalannya tidak semata ditentukan oleh niat politik pemerintah daerah, tetapi oleh sejauh mana faktor pendukung dapat dimobilisasi dan faktor penghambat dapat diminimalkan secara sistematis.

Dari sisi pendukung, kapasitas kelembagaan dan SDM merupakan fondasi utama. Pemerintah daerah yang memiliki unit kerja sama luar negeri yang terstruktur, jelas fungsi dan kewenangannya, serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan cenderung lebih mampu mengelola relasi internasional secara profesional. Kompetensi aparatur dalam hubungan internasional, diplomasi ekonomi, negosiasi lintas budaya, dan manajemen proyek internasional membuat kerja sama luar negeri tidak terjebak pada seremoni, tetapi bergerak ke tahap implementasi yang menghasilkan luaran yang dapat diukur. Penekanan Soldatos (1993) bahwa paradiplomasi membutuhkan kapasitas administratif yang memadai menjadi relevan karena tanpa kapasitas tersebut kerja sama lintas negara mudah kehilangan arah, indikator, dan keberlanjutan.

Kepastian regulasi juga menjadi faktor penopang yang menentukan. Kerangka UU No. 23 Tahun 2014 memberi legitimasi formal, namun efektivitas paradiplomasi meningkat ketika regulasi nasional diterjemahkan dalam aturan turunan di daerah, seperti Perda dan Perkada, yang mengatur mekanisme kerja sama, pembagian peran antar-OPD,

prosedur koordinasi, serta indikator kinerja. Sinkronisasi kebijakan pusat daerah ini penting agar paradiplomasi tidak dipersepsikan sebagai penyimpangan dari diplomasi nasional, melainkan sebagai bagian dari tata kelola diplomasi negara yang bersifat multi-level. Pada titik ini, kepemimpinan kepala daerah kembali menjadi penggerak utama: kepala daerah yang visioner, proaktif, dan berorientasi global mampu membaca peluang internasional, membangun jejaring lintas negara, serta mengarahkan birokrasi agar adaptif selaras dengan Bryson dan Crosby (2014) yang menekankan pemimpin publik sebagai pengorkestra kolaborasi dan policy entrepreneur. Dukungan infrastruktur dan potensi ekonomi daerah turut memperkuat daya tarik paradiplomasi, sebab konektivitas transportasi, kesiapan layanan, dan iklim investasi yang kondusif menjadi sinyal kapasitas daerah dalam menindaklanjuti komitmen kerja sama. Lebih jauh, keterlibatan aktor non-pemerintah sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil memperluas basis paradiplomasi menjadi kolaborasi multi-aktor (multi-stakeholder diplomacy), meningkatkan relevansi program, dan memperkuat keberlanjutan karena manfaatnya lebih langsung terkait kebutuhan publik serta dunia usaha.

Sebaliknya, efektivitas paradiplomasi sering dibatasi oleh hambatan yang bersifat struktural dan tata kelola. Keterbatasan SDM dan kapasitas birokrasi, terutama pada daerah yang belum memiliki pengalaman kerja sama internasional, kerap membuat paradiplomasi berjalan sporadis, reaktif, dan sulit dievaluasi dampaknya. Hambatan berikutnya adalah lemahnya koordinasi pusat daerah; ketidaksinkronan kebijakan, tumpang tindih kewenangan, serta prosedur perizinan yang kompleks dapat memperlambat bahkan menggagalkan inisiatif kerja sama internasional daerah. Kondisi ini menegaskan kebutuhan mekanisme koordinasi vertikal yang efektif agar peran dan kewenangan setiap level pemerintahan jelas, sehingga proses kerja sama tidak tersendat pada birokrasi.

Masalah serius lainnya adalah ketergantungan berlebihan pada figur kepala daerah. Paradiplomasi yang dipersonalisasi berisiko berhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan orientasi politik. Tanpa pelembagaan yang kuat misalnya integrasi program paradiplomasi ke RPJMD/Renja, pembentukan struktur permanen, SOP, dan indikator capaian paradiplomasi sulit berkembang menjadi kebijakan jangka panjang. Hambatan fiskal juga signifikan: ketika anggaran terbatas dan prioritas pembangunan berfokus pada kebutuhan dasar, paradiplomasi sering dipandang sebagai kegiatan tambahan, sehingga dukungan pendanaan menjadi minim dan tidak konsisten. Terakhir, risiko politik dan persepsi publik dapat menjadi penghambat ketika paradiplomasi dipersepsikan elitis atau pemborosan anggaran; pada titik ini transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik menjadi syarat agar paradiplomasi memperoleh legitimasi sosial dan dukungan politik yang memadai.

Secara keseluruhan, implementasi paradiplomasi yang efektif mensyaratkan kombinasi: kepemimpinan yang strategis, dukungan regulasi yang jelas, kapasitas institusi dan SDM yang memadai, infrastruktur serta potensi ekonomi yang kredibel, dan jejaring kolaborasi multi-aktor; sementara hambatan seperti lemahnya kapasitas, koordinasi yang buruk, personalisasi kebijakan, keterbatasan anggaran, serta resistensi persepsi publik perlu dikelola melalui pelembagaan, perencanaan yang terukur, dan tata kelola yang transparan.

Analisis Kasus Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Paradiplomasi daerah dapat dipahami secara lebih konkret melalui analisis kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan ruang otonomi untuk berperan aktif dalam hubungan internasional, terutama dalam kerangka diplomasi ekonomi. Sebagai salah satu provinsi dengan basis industri manufaktur terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki kepentingan strategis

untuk terhubung secara langsung dengan jejaring global guna menarik investasi, memperluas pasar ekspor, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Kondisi struktural tersebut menempatkan paradiplomasi bukan semata sebagai opsi kebijakan, melainkan sebagai kebutuhan pembangunan yang bersifat strategis dan kompetitif di tengah persaingan antarwilayah.

Dalam implementasinya, paradiplomasi Jawa Barat diwujudkan melalui beragam bentuk kerja sama internasional, seperti kemitraan sister province dan sister city, promosi investasi dan perdagangan ke luar negeri, serta kolaborasi pembangunan di sektor industri, pendidikan, dan teknologi. Ragam aktivitas ini menunjukkan karakter paradiplomasi yang fungsional dan pragmatis sebagaimana dikemukakan Duchacek (1988), yakni ketika aktor subnasional secara aktif berupaya mengakses sumber daya global modal, teknologi, serta pengetahuan yang tidak selalu dapat sepenuhnya dipenuhi melalui kanal negara pusat. Dalam konteks ini, paradiplomasi berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat posisi daerah dalam kompetisi global antarwilayah sekaligus memperluas opsi kebijakan pembangunan yang relevan dengan struktur ekonomi regional.

Peran kepala daerah menjadi faktor kunci yang mendorong keberhasilan paradiplomasi tersebut. Kepala daerah tampil sebagai aktor sentral yang menginisiasi kerja sama, membangun jejaring internasional, dan mempromosikan potensi ekonomi daerah di hadapan mitra asing. Peran ini sejalan dengan konsep policy entrepreneurship dan strategic leadership (Bryson & Crosby, 2014), yang menempatkan pemimpin publik bukan sekadar pengelola kebijakan, melainkan pencipta peluang melalui inovasi, negosiasi, dan kolaborasi lintas batas. Namun, dominannya peran personal kepala daerah sekaligus mengindikasikan kecenderungan personalisasi paradiplomasi: ketika agenda internasional terlalu bertumpu pada figur pemimpin, keberlanjutan program menjadi rentan terhadap perubahan arah politik dan pergantian kepemimpinan. Dalam situasi semacam ini, paradiplomasi berisiko tidak berkembang menjadi kebijakan publik yang stabil dan terlembagakan.

Dari perspektif tata kelola, praktik paradiplomasi Jawa Barat berjalan dalam kerangka koordinasi dengan pemerintah pusat dan tetap merujuk pada regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradiplomasi daerah di Indonesia tidak berkembang secara otonom sepenuhnya, melainkan berada dalam sistem multi-level governance, di mana hubungan internasional dikelola secara berlapis oleh aktor nasional dan subnasional. Hal ini memperkuat pandangan Soldatos (1993) bahwa paradiplomasi merupakan fenomena yang komplementer terhadap diplomasi nasional, bukan bentuk kompetisi ataupun tantangan terhadap kedaulatan negara. Paradiplomasi yang berada dalam kerangka koordinasi ini juga memperlihatkan pentingnya sinergi vertikal pusat daerah agar agenda internasional daerah tetap selaras dengan kepentingan nasional, sekaligus mampu menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

Dampak paradiplomasi terhadap diplomasi ekonomi daerah Jawa Barat terlihat dari meningkatnya minat investasi asing, khususnya pada sektor manufaktur dan industri berorientasi ekspor, serta terbukanya peluang transfer teknologi dan pengetahuan dari mitra internasional. Melalui kerja sama tersebut, daerah memperoleh akses terhadap best practices dalam pengelolaan kawasan industri, pengembangan pendidikan vokasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan argumen Okano-Heijmans (2013) dan Van Bergeijk et al. (1994) bahwa diplomasi ekonomi tidak semata berorientasi pada transaksi ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kapasitas struktural dan peningkatan daya saing jangka panjang. Dengan kata lain, paradiplomasi tidak hanya penting karena menghasilkan “hasil langsung” seperti investasi, tetapi juga

karena mendorong pembelajaran kelembagaan dan modernisasi kapasitas daerah.

Meski demikian, efektivitas paradiplomasi daerah masih menghadapi keterbatasan yang perlu dicatat secara kritis. Tidak semua kerja sama internasional terintegrasi secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD maupun rencana sektoral, sehingga dampaknya belum sepenuhnya berkelanjutan. Di saat yang sama, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sering belum optimal, yang menyebabkan implementasi hasil kerja sama berjalan lambat atau terfragmentasi. Keterbatasan institusional ini menegaskan bahwa paradiplomasi masih berada pada tahap transisi: dari praktik yang sangat bergantung pada aktor menuju kebijakan publik yang terlembagakan secara kuat. Dalam konteks tersebut, problem utama bukan semata pada “banyaknya kerja sama”, tetapi pada kapasitas sistem daerah untuk memastikan kerja sama itu ditindaklanjuti, diukur, dan ditambatkan pada target pembangunan.

Secara keseluruhan, analisis kasus Jawa Barat menunjukkan bahwa paradiplomasi memiliki potensi signifikan sebagai instrumen diplomasi ekonomi dan pembangunan wilayah ketika didukung kepemimpinan strategis, kapasitas institusional, serta kerangka otonomi daerah yang jelas. Namun, agar keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang dapat terjamin, paradiplomasi perlu dilembagakan secara lebih sistematis melalui penguatan regulasi daerah, integrasi ke dalam perencanaan pembangunan, dan peningkatan kapasitas birokrasi. Dengan demikian, paradiplomasi tidak menjadi aktivitas elit atau simbolik, melainkan bertransformasi menjadi kebijakan strategis yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah dalam sistem hubungan internasional yang semakin terdesentralisasi.

Sintesis Hubungan Kepemimpinan Kepala Daerah, Paradiplomasi, dan Diplomasi Ekonomi

Dalam kerangka otonomi daerah, hubungan antara kepemimpinan kepala daerah, paradiplomasi, dan diplomasi ekonomi membentuk satu mekanisme kebijakan yang saling bergantung. Landasan legalnya ditopang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyediakan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama internasional, sehingga paradiplomasi dapat dijalankan sebagai bagian sah dari tata kelola pemerintahan daerah. Dengan dibukanya ruang kewenangan melalui desentralisasi, daerah memiliki peluang untuk merespons dinamika dan peluang global secara lebih adaptif, kontekstual, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan lokal (Rondinelli, 1981).

Pada titik ini, kepemimpinan kepala daerah berfungsi sebagai faktor penggerak utama yang “mengaktifasi” ruang otonomi tersebut. Kepala daerah bekerja sebagai policy entrepreneur yang mengartikulasikan visi global daerah, menginisiasi paradiplomasi, dan mengarahkan birokrasi agar terlibat aktif dalam jejaring internasional (Bryson & Crosby, 2006). Paradiplomasi kemudian bertindak sebagai instrumen operasional yang menjembatani kepentingan lokal dengan struktur peluang global melalui promosi investasi, kerja sama sister city/province, dan partisipasi dalam forum internasional, sebagaimana dipahami dalam teori paradiplomasi Duchacek (1984) dan Soldatos (1993). Artinya, paradiplomasi menjadi medium kebijakan yang mengubah peluang global menjadi tindakan lokal yang memiliki tujuan ekonomi.

Dari integrasi kepemimpinan dan paradiplomasi inilah diplomasi ekonomi daerah muncul sebagai luaran yang bersifat konkret. Ketika paradiplomasi dijalankan secara terarah, terlembagakan, dan memiliki indikator, daerah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi, menarik investasi, serta memperluas akses pasar internasional (Saner & Yiu, 2003; Okano-Heijmans, 2013). Karena itu, efektivitas diplomasi ekonomi daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara kualitas kepemimpinan

kepala daerah, kapasitas institusional paradiplomasi, dan dukungan kerangka otonomi daerah. Integrasi ketiga unsur tersebut membuat daerah mampu bertransformasi dari sekadar objek globalisasi menjadi aktor subnasional yang aktif dan strategis dalam sistem hubungan internasional yang kian terdesentralisasi.

KESIMPULAN

Paradiplomasi merupakan fenomena strategis dalam hubungan internasional kontemporer yang menguat seiring globalisasi dan desentralisasi kewenangan, serta semakin relevan dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Praktik ini tidak sekadar memperluas aktivitas luar negeri pemerintah daerah, tetapi berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik yang dapat memperkuat diplomasi ekonomi daerah melalui akses investasi, perluasan pasar, penguatan jejaring bisnis, transfer pengetahuan, dan peningkatan daya saing wilayah. Dalam kerangka multi-level governance, paradiplomasi juga bersifat komplementer terhadap diplomasi nasional karena tetap beroperasi dalam batas regulasi dan koordinasi pusat daerah, khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Temuan utama kajian ini menegaskan bahwa kepemimpinan kepala daerah menjadi determinan paling krusial dalam efektivitas paradiplomasi. Kepala daerah berperan sebagai agenda setter dan policy entrepreneur yang mengartikulasikan visi global, menginisiasi kerja sama internasional, membangun jejaring strategis, serta mengarahkan birokrasi agar adaptif terhadap dinamika internasional. Kepemimpinan strategis yang mampu mengoreksasi kolaborasi lintas aktor membuat paradiplomasi bergerak melampaui seremoni menuju program yang berorientasi hasil, seperti promosi investasi, penguatan ekspor, kerja sama sister city/sister province, dan partisipasi dalam forum global. Namun, dominasi figur kepala daerah juga menimbulkan risiko personalisasi kebijakan, sehingga paradiplomasi rentan terhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan apabila tidak didukung pelembagaan yang memadai.

Selain faktor kepemimpinan, kapasitas institusional dan tata kelola menjadi penentu keberlanjutan paradiplomasi. Daerah yang memiliki perangkat kelembagaan, SDM kompeten, regulasi turunan, serta koordinasi lintas-OPD yang kuat cenderung mampu menindaklanjuti kerja sama internasional secara konsisten dan terukur. Sebaliknya, hambatan berupa keterbatasan anggaran, birokrasi yang belum adaptif, lemahnya integrasi ke dokumen perencanaan (RPJMD/Renja), serta kompleksitas koordinasi pusat daerah dapat membuat paradiplomasi berjalan sporadis dan terfragmentasi. Analisis kasus Jawa Barat menunjukkan bahwa paradiplomasi dapat menghasilkan dampak diplomasi ekonomi yang nyata khususnya pada peningkatan minat investasi dan penguatan kapasitas namun tetap menghadapi tantangan pelembagaan dan konsistensi implementasi lintas sektor.

Dengan begitu, paradiplomasi perlu dipahami sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Penguatan kepemimpinan kepala daerah harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas institusional, integrasi paradiplomasi ke perencanaan pembangunan, peningkatan koordinasi vertikal dan horizontal, serta pembangunan mekanisme evaluasi berbasis indikator. Langkah tersebut penting agar paradiplomasi tidak berhenti sebagai aktivitas simbolik, melainkan menjadi kebijakan strategis yang berkelanjutan dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta ketahanan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bryson, J. M., & Crosby, B. C. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66(s1), 44-55.
- Bryson, J. M., & Crosby, B. C. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, 74(4), 445-456.
- Duchacek, I. D. (1984). The international dimension of subnational self-government. *Publius: The Journal of Federalism*, 14(4), 5-31.
- Duchacek, I. D. (1988). Multicommunal and bilingual states as frameworks for paradiplomacy. *International Political Science Review*, 9(4), 403-426.
- Fernandez, S., & Rainey, H. G. (2017). Managing successful organizational change in the public sector. *Public Administration Review*, 66(2), 168-176.
- Kingdon, J. W. (1995). Agendas, Alternatives, and Public Policies (2nd ed.). New York: HarperCollins College Publishers.
- Okano-Heijmans, M. (2013). Economic diplomacy: Japan and the balance of national interests. *Clingendael Institute Discussion Papers in Diplomacy*, 1-23.
- Rachmawati, E., Diniyati, M., & Fitriana, R. (2019). Implementasi paradiplomasi dalam kerja sama internasional pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 155-168.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133-145.
- Saner, R., & Yiu, L. (2003). International economic diplomacy: Mutations in post-modern times. *Discussion Papers in Diplomacy*, Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Smith, J. (2023). Decentralization and local policy entrepreneurship in global governance. *Journal of Public Policy Studies*, 15(1), 25-41.
- Soldatos, P. (1990). An explanatory framework for the study of federated states as foreign-policy actors. In H. Michelmann & P. Soldatos (Eds.), *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units* (pp. 34-53). Oxford: Clarendon Press.
- Soldatos, P. (1993). Cascading subnational paradiplomacy in an interdependent and transnational world. In F. Aldecoa & M. Keating (Eds.), *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments* (pp. 45-64). London: Frank Cass.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Van Bergeijk, P. A. G., Okano-Heijmans, M., & Melissen, J. (Eds.). (2011). *Economic Diplomacy: Economic and Political Perspectives*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.